

URGENSI MENGAKARKAN KEMBALI RASA MALU DALAM KEHIDUPAN POLITISI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS ETIS FILOSOFIS

Andreas Maurenis Putra

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Bandung; andre.karvalho@yahoo.co.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Rasa Malu, Moralitas, Praktik Politik, Politisi, Kepercayaan Publik, Etika Filosofis, Budaya, Demokrasi Indonesia

Article history:

Received : 2025-08-12

Revised : 2025-08-11

Accepted : 2025-08-07

DOI:

<https://doi.org/10.26593/js.h.v5i01.9254>

ABSTRACT

Shame is often ignored in Indonesian political discourse even though it is important in controlling the practical morality of politics and building public trust. Through library research methods, this article explores the relationship between shame, ethics and contemporary Indonesian political praxis. The view of this article is that shame, as an ability among various aspects of human emotion that shapes human behavior, has disappeared from the lives of Indonesian politicians. Shame, as a moral catalyst and also embedded in national culture, is ignored in the lives of politicians. This is proven by various forms of unethical behavior in Indonesian political life, which ultimately harms Indonesia's rational and moral democratic order. Indonesia's political landscape is now filled with intrigue, ambition and dishonesty, manifesting in corruption, collusion, nepotism, patronage, policies that are detrimental to the people and oligarchic spirit. Based on various sources of ethical theory and political phenomena in Indonesia, this article emphasizes that shame needs to be immediately rooted again, in a constructive direction. This can be achieved through ethics-based political education, electoral system reform, strengthening the role of the media, and implementing strict sanctions.

ABSTRAK

Rasa malu sering kali diabaikan dalam diskursus politik Indonesia walaupun penting dalam mengontrol moralitas praktis politik dan membangun kepercayaan publik. Melalui metode penelitian pustaka, artikel ini mengeksplorasi hubungan antara rasa malu, etika, dan praksis politik kontemporer Indonesia. Pandangan artikel ini adalah rasa malu sebagai kemampuan di antara berbagai aspek emosi manusia yang membentuk perilaku manusia, telah hilang dari kehidupan para politisi Indonesia. Rasa malu, sebagai katalis moral sekaligus telah melekat sebagai budaya bangsa, diabaikan dalam kehidupan para politisi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai bentuk perilaku tidak etis dalam kehidupan politik Indonesia, yang akhirnya mencederai tatanan demokrasi Indonesia yang rasional dan bermoral. Lanskap politik Indonesia kini dipenuhi intrik, ambisi, dan ketidakjujuran, mewujudkan dalam korupsi, kolusi, nepotisme, patronase, kebijakan yang merugikan rakyat, dan semangat oligarkis. Berdasarkan berbagai sumber teori etika dan fenomena politik di Indonesia, artikel ini menegaskan bahwa rasa malu perlu segera diakarkan kembali, ke arah yang konstruktif. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan politik berbasis etika, reformasi sistem Pemilu, penguatan peran media, dan penerapan sanksi yang tegas.

1. PENDAHULUAN

Di dalam peradaban yang ditandai dengan laju globalisasi dan perubahan lanskap moral, peran rasa malu dalam kepemimpinan politik terasa semakin mendesak. Rasa malu bisa menjadi katalis moral dalam kehidupan para politisi. Mencius mengatakan bahwa rasa malu merupakan bagian integral dari pengembangan karakter moral dan warisan seperti kebaikan, kebenaran, dan integritas. Seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk merasa malu tidak mungkin menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan menunjukkan perilaku yang baik. Mencius menekankan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa rasa malu. Rasa malu adalah awal dari integritas diri. Rasa malu tidak diragukan lagi adalah salah satu kekuatan emosional terkuat yang mempengaruhi perilaku dan pemikiran kita. Rasa malu memainkan peranan penting dalam kehidupan moral. Rasa malu adalah cara manusia untuk berada dalam watak yang berbudi luhur dan secara konkret terwujud tidak hanya sebagai penegasan diri tetapi juga dapat menghentikan sesuatu yang buruk agar tidak terjadi.

Dalam konteks politik Indonesia, rasa malu memiliki makna yang mendalam dan kompleks. Rasa malu bukan sekadar emosi, melainkan adalah etika yang seharusnya menjadi landasan bagi politisi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Di tengah tantangan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, urgensi rasa malu dalam kehidupan politisi Indonesia menjadi semakin penting terutama saat ini rasa malu menjadi hal yang langka, aneh, dan asing. Rasa malu bukan lagi sebuah standar moral yang dipegang kuat. Rasa malu tidak lagi menjadi ukuran bagi kualitas kemanusiaan, bukan tolok ukur bagi integritas atau eksistensi manusiawi. Dalam politik Indonesia, rasa malu sering kali diabaikan, padahal merupakan pilar fundamental dalam kerangka etika yang mengatur perilaku politik. Rasa malu, yang seharusnya menjadi pengingat moral dan etika bagi para pemimpin dan politisi diabaikan demi kepentingan kekuasaan dan keuntungan pribadi. Rasa malu diabaikan demi ambisi politik. Rasa malu yang telah mengakar sebagai budaya Indonesia kini perlahan-lahan terkikis. Alhasil politik menjadi arena yang penuh intrik, ambisi, dan ketidakjujuran. Politisi melakukan hal-hal yang memalukan tanpa keberatan, bahkan tanpa tedeng aling-aling. Politisi dapat dengan ringan hati terlibat dalam beragam skandal politik. Mulai dari proses elektoral yang manipulatif, politik uang, korupsi, penggelapan dana, nepotisme, politik identitas, patronase, favoritisme, praktik otoriter, nuansa oligarkis hingga perumusan kebijakan-kebijakan negara yang tidak memihak rakyat.

Meluasnya beragam penyimpangan yang dilakukan oleh para wakil rakyat ini melahirkan pesimisme secara luas terhadap demokrasi. Demokrasi hari-hari ini dipenuhi aspek-aspek yang mencederai demokrasi itu sendiri. Dinamika bernegara menjadi tidak kondusif. Tidak sedikit masyarakat yang kemudian menjadi tidak percaya terhadap jalannya pemerintah. Istilah "wakil rakyat" dikhianati dan ditunggangi oleh politik kepentingan, uang, dan identitas. Wajah demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang sakit seperti diungkapkan oleh A. Saifuddin Bintang karena rendahnya etika moral pejabat negara. Demokrasi Indonesia hari ini berada di ujung kematian. Kronisnya politik Indonesia hari-hari ini dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Hilangnya rasa malu adalah akar dari semua persoalan ini. Dengan demikian, mengakarkan kembali rasa malu dalam kehidupan politik di negara demokrasi ini semakin mendesak. Namun pertanyaannya adalah mengapa rasa malu? Mengapa rasa malu harus dihidupkan oleh para politisi di Indonesia? Melalui analisis etis filosofis, artikel ini akan mengeksplorasi urgensi rasa malu terutama fungsinya dalam mengontrol moral dalam praktik politik dan dampaknya terhadap kepercayaan publik. Tujuan artikel ini adalah menekankan kepada para politisi Indonesia bahwa hanya dengan menghidupkan kembali rasa malu maka integritas moral dalam jabatan dapat bertumbuh.

Menghidupkan kembali rasa malu sangatlah penting di tengah skandal/penyimpangan jabatan oleh politisi. Beberapa peneliti terdahulu mencoba melihat akar dari skandal-skandal politis ini. Surya Yudha Regif dan Muhammad Akbar Pribadi dalam artikel jurnal mereka yang berjudul "Destruction Democracy Through Determinants of Vote Buying in General Elections in Indonesia" (2024) melihat bahwa rusaknya demokrasi Indonesia disebabkan oleh praktek jual beli suara pada pemilu di Indonesia. Ini telah menjadi masalah serius dalam pembangunan demokrasi. Di satu sisi dapat meningkatkan partisipasi politik untuk mendapatkan insentif penerima. Di sisi lain, hal ini dapat merusak kepercayaan dan menurunkan partisipasi pihak-pihak yang memandangnya sebagai praktik korupsi yang merusak moral dan etika politik.

Mujiono Hafidh Prasetyo melihat bahwa salah satu penyakit politik dan penyimpangan hukum yang menodai citra pesta demokrasi adalah politik uang (money politics). Fenomena politik uang (money politics) mewarnai berbagai even pilkada di tanah air. Susan Rose-Ackerman (1999) mengafirmasi bahwa jalinan uang dan politik menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyimpangan. Edward Aspinall melihat bahwa lemahnya institusi politik yang kuat telah menciptakan lahan subur bagi oportunisme. Politisi, yang didorong oleh keinginan untuk mengamankan posisi mereka, mungkin melakukan korupsi, nepotisme, atau praktik tidak etis lainnya untuk mempertahankan pengaruh mereka. Jual beli suara, politik uang, dan lemahnya institusi politik yang kuat adalah beberapa alasan dibalik sejumlah penyimpangan jabatan atau skandal politik di Indonesia. Ini fakta yang tidak dapat dipungkiri dalam dinamika politik Indonesia. Penulis setuju dengan gagasan para peneliti terdahulu. Meskipun begitu penulis tetap berbeda pendapat dengan para peneliti tersebut. Dari sejumlah alasan dibalik skandal politis di Indonesia terdapat alasan lain yang paling mendasar sebagai akar penyebab skandal-skandal politis. Menurut penulis penyebab perilaku tidak etis, penyimpangan dalam jabatan atau skandal politis di negeri ini adalah hilangnya rasa malu.

Tulisan ini akan memberikan kedalaman wawasan yang berharga bagi masyarakat pembaca, khususnya meningkatkan kesadaran para politisi akan pentingnya rasa malu dalam membangun struktur pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bermoral dan mempunyai legitimasi publik.

2. METODE PENELITIAN

Landasan analisis topik ini dibangun pada metode penelitian kepustakaan, yang mencakup pendekatan sistematis dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan. John W. Creswell juga menekankan bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu proses sistematis yang memungkinkan peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber. Berdasarkan dua pengertian metode penelitian pustaka tersebut, proses penelitian tulisan ini dimulai dengan mengidentifikasi tema-tema kunci terkait rasa malu. Dalam hal ini gagasan-gagasan yang bernuansa filsafat, filsafat politik, kepemimpinan, etika, budaya, dan lanskap politik Indonesia akhir-akhir ini.

Berbagai sumber diidentifikasi termasuk buku-buku ilmiah, artikel dari jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel-artikel media sosial tentang rasa malu dalam konteks budaya Indonesia, rasa malu sebagai kontrol moral, urgensi rasa malu dalam membangun kepercayaan publik, dan tantangan rasa malu dalam praktik politik modern khususnya di Indonesia. Sumber-sumber ini kemudian disusun secara tematis, dengan fokus pada poin-poin tersebut. Pendekatan terstruktur ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman mendalam tentang pentingnya rasa malu bagi para politisi. Selanjutnya, teks-teks terpilih dianalisis dan disintesis secara kritis untuk mengembangkan pemahaman yang koheren tentang pentingnya rasa malu dalam arena politik Indonesia terutama sebagai pengontrol moral dan untuk membangun kepercayaan publik.

Analisis dan sintesis ini dimaksudkan agar gagasan para ahli dapat saling mengokohkan dan mendukung sekaligus memperkuat argumentasi penulis mengenai topik yang diangkat. Terakhir, hasil analisis dan sintesis kemudian dijadikan acuan untuk merumuskan langkah-langkah penting ke depan mengenai upaya menghidupkan kembali rasa malu politisi di Indonesia di tengah berbagai skandal politik yang terus mendera kehidupan politik Indonesia saat ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Etis Filosofis

Pertanyaan krusial di sini adalah mengapa rasa malu? Rasa malu telah menjadi aspek kesadaran manusia yang paling mendasar dalam pembentukan perilaku. Itu artinya bahwa jika sesuatu yang mendasar (rasa malu) dalam diri manusia hilang maka akan berimplikasi besar pada hal lain dalam manusia (manusia menjadi tidak terkontrol dalam berperilaku). Oleh sebab itu, tidak berlebihan mengatakan bahwa rasa malu adalah bagian dari kesadaran yang paling arkais, berakar secara psikologis dan eksistensial. Dalam konteks politik, hilangnya rasa malu, atau mengabaikan rasa malu, berimplikasi pada hilangnya integritas moral politisi. Robert Wright (1994) menegaskan bahwa emosi seperti rasa malu telah berevolusi untuk memperkuat ikatan sosial dan mendorong perilaku yang sesuai dengan norma kelompok. Di dalam "Nicomachean Ethics", Aristoteles mengaitkan rasa malu dengan moralitas. Aristoteles menegaskan bahwa kebajikan moral muncul dari pengendalian diri dan kesadaran akan tindakan kita, di mana rasa malu berperan sebagai indikator dari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral.¹ Di sini rasa malu terkait erat dengan pembentukan identitas diri, berfungsi sebagai cermin yang memantulkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh individu.

J. Verkuyl dalam analisisnya turut menegaskan demikian, binatang tidak mempunyai rasa malu, iblis pun tidak mempunyai rasa malu, tetapi manusia mempunyai rasa malu. Rasa malu adalah kata hati tubuh manusia², yang dapat membatasi manusia supaya tidak sebebas-bebasnya melakukan hal yang tidak etis.³ Meskipun sering kali dipandang sebagai emosi negatif, rasa malu dapat melayani fungsi moral dalam masyarakat. Rasa malu adalah salah satu kontrol moral hakiki manusia yang hadir secara eksistensial. Simone de Beauvoir (1948) membahas sifat ganda dari rasa malu, sebagai emosi pribadi maupun sosial. Hal ini mencerminkan kesadaran individu atas tindakannya sehubungan dengan norma dan harapan masyarakat. Filsuf Jerman Friedrich Nietzsche (1989) menyajikan rasa malu sebagai alat untuk refleksi diri dan pertumbuhan pribadi, dengan menekankan perannya dalam pengembangan kesadaran moral. Maka dalam konteks kehidupan politik, rasa malu harus dipahami sebagai mekanisme pengaturan perilaku. Hal ini memaksa individu untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga pada masyarakat kolektif. Dengan kata lain, rasa malu dapat memotivasi tindakan yang baik secara moral dan reformasi diri serta dapat menghukum amoralitas dengan rasa malu yang menyakitkan.⁴

¹ Aristotle, *Nicomachean ethics*, trans. oleh W.D. Ross (Batoche Books, 1999), 10.

² J. Verkuyl, *Etika Kristen: bagian umum*, 31 ed. (PT BPK Gunung Mulia, 2018).

³ Robinson Marbun dan Rencan Marbun, "MENUNTUN KEPADA PENGERTIAN RASA MALUDALAM MEMBANGUN KEBERANIAN HIDUP BENAR," *Jurnal Eksplorasi Teologi* 7, no. 5 (2023): 41-47.

⁴ Westerlund, "Shame, Love, and Morality," 517.

Teori etika Immanuel Kant (1997) juga mengatakan bahwa tindakan moral harus dipandu oleh kewajiban dan rasa hormat terhadap orang lain. Pemimpin politik mempunyai kewajiban moral yang harus dipenuhi apapun konsekuensinya. Imperatif kategoris Kant ini menuntut agar individu bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara universal dan dihormati oleh semua orang. Etika Kantian menekankan pada martabat dan otonomi individu, yang mengarah pada komitmen terhadap keadilan. Dengan kata lain, jika rasa malu tidak terkikis dari diri para politisi, maka integritas moral mereka akan tetap kuat sehingga tidak mudah terjerumus dalam perilaku dan praktik menyimpang. Martabat dan otentisitas mereka akan tetap terjaga. Sebaliknya jika rasa malu terkikis maka integritas moral tidak dapat bertumbuh, sebagaimana kata Mencius, rasa malu adalah awal integritas diri.

Konteks Budaya Indonesia

Rasa malu adalah emosi kompleks yang terkait dengan etika, moralitas, dan norma sosial. Hal ini sering kali dianggap sebagai perasaan negatif, respons yang terinternalisasi terhadap kegagalan atau pelanggaran yang dirasakan. Namun, rasa malu juga bisa menjadi katalisator pertumbuhan pribadi dan perubahan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sebuah negara yang memiliki beragam budaya, agama, dan lanskap politik, peran rasa malu menjadi sangat penting. Rasa malu, sebagai sebuah konstruksi budaya, sangat bervariasi antar masyarakat di Indonesia. Rasa malu terkait dengan identitas kolektif dan norma-norma sosial. Dalam budaya Indonesia, rasa malu memiliki nilai yang tinggi. Menurut Koentjaraningrat, rasa malu merupakan bagian integral dari sistem nilai masyarakat Indonesia yang mengedepankan keharmonisan dan rasa saling menghormati.⁵

Karena berakar dalam nilai-nilai budaya yang mengedepankan keharmonisan, sopan santun, dan penghormatan terhadap orang lain, rasa malu mengajak setiap individu untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka. Rasa malu di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kolektivisme yang mendominasi interaksi sosial. Sehingga dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, rasa malu menjadi alat untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan antarsesama. Menurut Clifford Geertz, rasa malu berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menahan individu dari perilaku yang dapat merugikan reputasi atau martabat keluarga.⁶ Ini berarti struktur budaya malu dijalin dengan ekspektasi masyarakat, dimana individu dibatasi oleh keharusan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada untuk menghindari stigma pelanggaran.⁷

Dalam konteks ini individu dituntut dan diharapkan berperilaku secara pantas. Dalam banyak budaya di Indonesia, tindakan yang dianggap tidak sopan atau memalukan, seperti berperilaku kasar atau tidak menghormati orang tua, dapat membawa rasa malu tidak hanya pada individu bersangkutan, tetapi juga pada keluarganya. Praktik adat dan tradisi di berbagai daerah di Indonesia mempresentasikan soal ini. Dalam upacara pernikahan, misalnya, keluarga mempelai akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga citra dan kehormatan. Jika terjadi sesuatu yang dianggap memalukan, seperti ketidakcocokan antara keluarga mempelai, ini dapat berdampak negatif pada reputasi kedua belah pihak. Di sini rasa malu berfungsi sebagai pengingat untuk bertindak dengan hati-hati dan menghormati norma yang ada.

Selain itu, rasa malu juga dapat menjadi alat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi. Misalnya, dalam budaya Jawa, ada istilah "ngemong" yang berarti menjaga sikap dan

⁵ Koentjaraningrat, *Manusia dan kebudayaan di Indonesia* (Djambatan, 1985), 378.

⁶ Clifford Geertz, *The interpretation of cultures* (Basic Books, 1973), 8.

⁷ Utsman Mauridho Azizie, Muhamad Daffa, dan Dayinta Sukma Kumala, "Etika dan moral kepemimpinan lembaga negara: Studi rasa bersalah dan malu terhadap kasus korupsi ketua KPK firli bahuri," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 929, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13751184>.

perilaku agar tidak menimbulkan rasa malu. Seseorang yang melanggar norma tersebut dapat dianggap sebagai "tidak tahu diri" dan akan menghadapi stigma sosial. Budaya Minangkabau juga memiliki tradisi "adat basandi syara', syara' basandi kitabullah," yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini rasa malu menjadi salah satu pendorong untuk mematuhi norma-norma ini demi keharmonisan bersama. Dalam budaya Sunda, terdapat ungkapan "teu meunang nyieun malu," yang berarti "tidak boleh membuat malu." Ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya rasa malu dalam interaksi sosial. Bima, Nusa Tenggara Barat memiliki adat "maja labo dahu". Ini bermakna bahwa setiap orang harus memiliki rasa malu di depan manusia dan takut di ribaan Tuhan. Di sini rasa malu menjadi pengingat bagi individu untuk bertindak sesuai dengan norma dan harapan masyarakat.

Konsep "harga diri" dan "martabat" dalam masyarakat juga berhubungan erat dengan rasa malu. Kepada setiap individu, kesadaran ini penting. Demikian halnya para pejabat publik/politisi. Politisi yang tidak memiliki rasa malu cenderung terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan, seperti korupsi, politik uang, jual-beli jabatan, dan praktik lainnya yang serupa. Dalam hal ini, rasa malu berfungsi sebagai pengingat untuk menjaga martabat diri dan reputasi publik. Mengutip Arief Budiman dalam "Politik dan Budaya", rasa malu bisa menjadi penghalang bagi politisi untuk melakukan tindakan yang tidak etis, karena mereka menyadari bahwa tindakan tersebut akan merusak reputasi mereka di mata publik, baik itu kehormatan atau martabat pribadi ataupun keluarga.

Pemahaman tentang rasa malu dalam budaya Indonesia, meskipun mengakar secara konseptual, kini mengalami tantangan signifikan secara praksis. Dengan perkembangan zaman dan globalisasi, nilai-nilai budaya tradisional di Indonesia mulai mengalami perubahan. Rasa malu yang telah menjadi norma sosial yang kuat kini menghadapi tantangan dari budaya modern yang lebih individualis. Terjadi penekanan pada adopsi nilai-nilai dari budaya Barat yang lebih mengedepankan kebebasan berekspresi. Hal ini dapat dilihat dari cara individu menggunakan media sosial, di mana banyak individu merasa bebas untuk mengekspresikan diri tanpa mempertimbangkan norma sosial yang ada. Paling mencolok adalah generasi muda. Mereka sepertinya hidup di era yang tidak perlu memerhatikan etika. Perilaku dari sekelompok generasi muda bertolak belakang dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Generasi muda yang diharapkan menjadi tonggak perubahan bangsa, justru berkontribusi melakukan perilaku-perilaku yang memalukan.⁸ Moralitas generasi muda saat ini sangat memprihatinkan, terutama perilaku yang menunjukkan ketidakpedulian, seperti kurang menghargai dan menghormati orang lain.⁹ Media sosial telah mengubah cara individu berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi juga membawa tantangan baru terkait dengan privasi, reputasi, dan norma sosial.

Dengan kata lain, meskipun rasa malu tetap memiliki tempat dalam masyarakat, kini berada dalam tantangan serius. Barangkali masih banyak orang tua dan tokoh masyarakat yang menekankan pentingnya rasa malu sebagai bagian dari pendidikan karakter. Mereka masih memandangnya bukan sebagai beban, tetapi sebagai alat untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan menghargai norma sosial. Namun melihat kembali persoalan-persoalan sosial di tengah laju teknologi, terutama berbagai bentuk skandal politis yang dilakukan oleh politisi, rasanya kesadaran tentang rasa malu perlu disuarakan sebagai diskursus publik yang mendesak dan serius. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi, rasa malu tetap berperan dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Benedict Anderson (1991)

⁸ E. Constant Giawa dan Nani Nurrachman, "REPRESENTASI SOSIAL TENTANG MAKNA MALU PADA GENERASI MUDA DI JAKARTA," *Jurnal Psikologi* 17, no. 1 (2018): 79, <https://doi.org/10.14710/jp.17.1.77-86>.

⁹ Ilham Hudi dkk., "Krisis Moral dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 1, no. 2 (2024): 233-41.

menegaskan bahwa identitas politik di Indonesia sering kali dibangun di atas nilai-nilai budaya dan moral. Politisi yang memahami pentingnya rasa malu akan lebih mampu membangun identitas yang kuat dan positif di mata publik. Dalam konteks globalisasi, di mana nilai-nilai Barat sering kali mendominasi, rasa malu dapat menjadi pengingat akan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya lokal. Di sini bisa dikatakan bahwa "budaya malu erat kaitannya dengan kemajuan peradaban masyarakat. Tingginya budaya malu dalam suatu kelompok masyarakat akan meningkatkan kualitas keberadaban masyarakat."¹⁰

Rasa Malu sebagai Pengontrol Moral

Di dunia politik yang penuh dengan godaan dan tekanan, rasa malu dapat berfungsi sebagai pengontrol moral yang penting. John Adair (2002) menekankan pentingnya etika dalam kepemimpinan politik.¹¹ Etika politik adalah fondasi bagi terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika politisi bertindak berdasarkan prinsip etika, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban moral, tetapi juga memperkuat legitimasi dan dukungan dari masyarakat. Rasa malu, yang berhubungan erat dengan moral (Aristoteles, Nietzsche) dapat mendorong politisi untuk berpikir mendalam sebelum mengambil keputusan yang mungkin merugikan masyarakat. Merawat rasa malu dalam kehidupan berpolitik membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, dan pada gilirannya dapat menjaga fondasi demokrasi.

Hal ini perlu diperhatikan secara serius. Pada 2024, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis indeks persepsi demokrasi Indonesia anjlok tiga peringkat menjadi posisi ke-59 dengan skor 6,44. Angka ini diperoleh melalui beberapa komponen penilaian seperti proses pemilihan, pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi dan budaya politik, serta kebebasan sipil. Dari komponen yang diukur, skor terendah ada pada ranah kultur politik dan kebebasan sipil. EIU menyorot keras menguatnya politik dinasti sebagai salah satu faktor signifikan yang berkontribusi pada cacatnya demokrasi. Politik dinasti, misalnya, tak hanya muncul di level pilpres, tapi juga pilkada. Sorotan paling tajam ditujukan pada manuver Jokowi dalam mendukung pencalonan Prabowo sekaligus menitipkan Gibran sebagai wakil. Kekhawatiran muncul karena iklim demokrasi berubah ke arah sentralisasi kekuasaan dan akan hilang penyeimbang dalam demokrasi. Kekhawatiran ini mulai nyata di dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Atas hal-hal ini akhirnya harus dipahami bahwa identitas politisi tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang diemban, tetapi juga oleh nilai-nilai yang dianut.

Lebih jauh, para politisi Indonesia perlu menyadari bahwa konsep rasa malu itu sendiri adalah bagian budaya kolektif bangsa ini. Rasa malu selalu berkaitan dengan kehormatan dan martabat pribadi dan keluarga, tradisi kelompok masyarakat, reputasi publik, dan norma-norma sosial. Pelanggaran terhadapnya dapat memunculkan stigma sosial. Immanuel Kant dalam teori etikanya mengatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang diambil berdasarkan kewajiban moral. Politisi yang memiliki kesadaran rasa malu akan merasa terikat oleh kewajiban moral untuk bertindak demi kepentingan publik, bukan demi kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, rasa malu berfungsi sebagai pendorong untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Kesadaran ini menjadi penting terutama di tengah politik Indonesia yang dinamis, kompleks dan kritis.

Sejak reformasi 1998, akhir era Orde Baru, harapan akan demokrasi yang lebih baik dan pemerintahan yang bersih mulai tumbuh. Namun kini berbagai tantangan muncul seiring penyimpangan oleh politisi dalam jabatan mereka. Korupsi, misalnya, menjadi salah satu bentuk

¹⁰ Syifa Najla Widiyanti dan Kamaruddin Salim, "Budaya Malu Sebagai Fakta Sosial Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Ilmu dan Budaya* 44, no. 2 (2023): 94, <https://doi.org/10.47313/jidb.v44i2.2352>.

¹¹ John Adair, *Inspiring Leadership* (London: Talbot Adair Press, 2002), 11.

penyimpangan yang paling mencolok di Indonesia. Dari skandal suap hingga penggelapan dana, tindakan korupsi oleh politisi telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Misalnya kasus mega korupsi tata kelola migas di lingkungan PT Pertamina (Persero) yang merugikan negara sekitar Rp193,7 triliun. Kemudian skandal PT Timah yang merugikan negara Rp 271 triliun. Selain itu, tiga hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi yang berhubungan dengan putusan bebas Ronald Tannur. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, telah mencapai tingkat kejahatan luar biasa di Indonesia. Korupsi terjadi di hampir semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial dan usia. Semua pejabat terkena dampaknya, mulai dari pejabat publik di berbagai institusi pemerintahan di tingkat pusat, kabupaten, dan kota.¹² Meski disebut sebagai kejahatan luar biasa, upaya pemberantasannya berjalan inkonsisten dan tidak maksimal.

Nepotisme yang menghancurkan meritokrasi menjadi bentuk penyimpangan lain yang umum terjadi di kalangan politisi. Nepotisme terjadi ketika seorang politisi memberikan keuntungan atau posisi kepada keluarga, kerabat, dan teman dekatnya tanpa mempertimbangkan kualifikasi yang memadai. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan menurunkan kualitas pemerintahan. Dalam karyanya berjudul "Political Culture in Indonesia: A Historical Perspective", Robert Hefner mencatat bahwa budaya politik di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh patronase dan nepotisme, di mana rasa malu tidak selalu menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Politisi yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka sering kali merasa terpaksa untuk berkompromi dengan nilai-nilai etis demi menjaga hubungan dengan para pendukung dan donor. Politisi mengabaikan rasa malu demi relasi tersebut. Gelaran Pemilu 2024 lalu ketika putusan Mahkamah Konstitusi meloloskan Gibran menjadi cawapres meskipun melanggar UU, dapat menjadi contoh. Kehadiran Gibran dalam daftar calon wakil presiden menandai munculnya dinasti politik baru di negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.¹³ Ambisi pribadi Jokowi mengalahkan kesadaran rasa malu akan integritas moral kepemimpinan demi melanggengkan dinasti politik kekuasaan. Imbas dari sejumlah penyimpangan integritas moral kepemimpinan membawa Jokowi ke dalam daftar pemimpin korup di dunia Tahun 2024 oleh "Organized Crime and Corruption Reporting Project" (OCCRP).¹⁴

Persoalan akut lainnya adalah kolusi. Kolusi melibatkan kerjasama antara politisi dan pihak-pihak tertentu, seperti pengusaha, untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Praktik ini sering kali mengarah pada penyalahgunaan anggaran dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Contohnya, mantan bupati Lampung Tengah, Mustafa, memberikan suap agar anggota DPRD dapat memberikan persetujuan tentang rencana pinjaman uang sebesar Rp300 miliar dari Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI pada tahun anggaran 2018. Pinjaman uang tersebut direncanakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan dalam kebijakan termasuk isu yang meresahkan. Cukup banyak politisi yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, mengabaikan tanggung jawab

¹² Fahrizal S. Siagian dkk., "Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 29–52, <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>.

¹³ Keith B. Richburg, "Opinion | Southeast Asian dynasties are rising again. That's troubling news.," *Washington Post*, 2023, <https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/28/southeast-asia-political-dynasties-rise/>.

¹⁴ Tempo dan Arif Zulkifli, "Korupsi Jokowi 2024 OCCRP," *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/kolom/korupsi-jokowi-2024-occrp-1192917>.

mereka terhadap masyarakat. Pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan publik, seperti pengesahan undang-undang yang merugikan rakyat. Contoh penyalahgunaan kekuasaan dapat dilihat dalam pengesahan undang-undang yang kontroversial, seperti Omnibus Law yang disahkan pada tahun 2020. Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) juga penuh kontroversi. Menurut "Indonesia Corruption Watch", revisi ini menunjukkan kentalnya nuansa politik patronase dalam hal subjek penerima izin pertambangan dan potensi besar korupsi dalam prioritas pemberian izin tambang. Terlebih lagi proses pembahasan revisi UU Minerba terlalu ugal-ugalan, sangat kilat, dan tidak transparan, dinilai sebagai bentuk "balas budi" politik serta mengabaikan lingkungan dan hak masyarakat.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa rasa malu sebagai pengontrol moral yang berfungsi untuk mencegah terjadinya skandal moral dalam arena politik, tergerus dari kehidupan pejabat publik. Pejabat publik menjadi tidak peduli bahwa tindakan korupsi, suap, nepotisme, kolusi, dan penyelewengan jabatan akan mencemarkan citra politik, martabat dan nama baik dirinya dan keluarganya, bahkan nama baik Indonesia di mata global. Pejabat publik kehilangan rasa malu sehingga menjadi apatis terhadap identitas dan integritas jabatan. Mereka terus membabi buta dan pantang mundur untuk berbuat sesuatu yang memalukan. Mereka bahkan tak mundur dari jabatan dengan hormat dan memilih bertahan meski tanpa kehormatan. Di sini rasa malu sebagai pengontrol internal dengan mudah diabaikan. Imbasnya pejabat publik secara terbuka mengabaikan rasa malu sebagai mekanisme eksternal yang mendorong mereka untuk memenuhi tanggung jawab kepada publik. Pejabat publik tidak lagi menyadari bahwa tindakan mereka akan diawasi oleh masyarakat, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa rasa malu yang berkontribusi pada pembentukan kepemimpinan yang beretika dan bertanggung jawab, yang sangat dibutuhkan di Indonesia untuk membangun kepercayaan publik, tercerabut dari kehidupan bernegara, tercerabut dari kesadaran politisi Indonesia.

Membangun Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah elemen kunci dalam sistem demokrasi. Tanpa kepercayaan, legitimasi pemerintah akan dipertanyakan, dan stabilitas politik dapat terganggu. Hal ini juga mempengaruhi kesediaan warga negara untuk terlibat dengan institusi, menaati hukum, dan berpartisipasi dalam kehidupan sipil. Kepercayaan publik adalah elemen fundamental yang dapat menentukan keberhasilan suatu masyarakat atau pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, kepercayaan publik dapat didefinisikan sebagai kepercayaan warga negara terhadap institusi politik dan pemimpinnya untuk bertindak demi kepentingan publik. Secara sederhana kepercayaan publik dapat bertumbuh ketika kata-kata dan tindakan para politisi selaras satu sama lain, dalam hal mengatakan kebenaran, menepati janji, dan terlibat dengan masyarakat.

Rasa malu adalah mekanisme untuk mewujudkan kepercayaan publik. Thomas Scheff menegaskan bahwa rasa malu dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengikat individu pada norma dan nilai kolektif.¹⁵ Individu, dalam hal ini pejabat publik/politisi, yang memiliki rasa malu akan cenderung melakukan introspeksi diri sebelum melakukan tindakan tertentu, terutama tindakan yang berpotensi merugikan banyak orang. Bahkan di saat melanggar aturan, politisi akan berusaha memperbaiki diri agar dapat diterima kembali di komunitas sosialnya. Kesadaran seperti ini diperlukan dalam hubungan perjanjian sosial dimana pejabat publik secara sosial terikat oleh kepentingan bersama, dengan masyarakat yang dilayaninya. Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, dalam teori kontrak sosialnya menekankan pentingnya

¹⁵ Frank Adloff, "Thomas J. Scheff: Shame and the Social Bond," *Hauptwerke der Emotionssoziologie*, 2013, 290–95, https://doi.org/10.1007/978-3-531-93439-6_42.

kesepakatan antara individu dan masyarakat untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil. Dalam konteks ini, rasa malu yang mengakar dalam budaya kolektif bangsa dapat dilihat sebagai bagian dari "kontrak sosial" yang tidak tertulis. Jadi ketika pemimpin politik gagal menepati janji politik dalam kontrak sosial, kepercayaan masyarakat akan menurun. Mozumder dalam penelitiannya mengingatkan bahwa persoalan ini perlu menjadi perhatian khusus karena kepercayaan terhadap pemimpin politik dan pemerintah berada pada tingkat yang rendah meskipun kepercayaan terhadap pemerintah dianggap sebagai hal yang sangat diperlukan agar demokrasi dapat berfungsi secara efektif.¹⁶

Kepercayaan publik itu sendiri dapat ditumbuhkan melalui akuntabilitas dan transparansi seperti dikatakan oleh Mark E. Warren (2010). Peran rasa malu dalam konteks ini adalah membantu politisi/pejabat publik mengingat dan menghidupkan prinsip-prinsip tersebut. Pertama, akuntabilitas adalah salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik. Ketika individu atau institusi bersedia untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, mereka menciptakan ruang untuk dialog dan perbaikan. Rasa malu dapat mendorong individu untuk tidak hanya mengakui kesalahan, tetapi juga untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperbaikinya. Bahkan rasa malu yang disadari dapat mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam jabatan sehingga para politisi tidak tergoda untuk mengabaikan perilaku yang akuntabel. Dalam pengertian ini, rasa malu menjadi jembatan yang menghubungkan individu dengan masyarakat, memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kepercayaan. Akuntabilitas dalam lingkup ini dapat dikategorikan ke dalam tiga hal yaitu publik, fisikal, dan administratif. Akuntabilitas publik menempatkan kewaspadaan pada pejabat publik untuk menggunakan tenaga dan sumber daya publik termasuk dana, peralatan dan material dengan bijaksana. Akuntabilitas fiskal atau finansial adalah akuntabilitas yang memerlukan perilaku baik oleh pejabat publik dalam penggalangan dana dan pengeluaran dana publik. Ini menekankan audit keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan keuangan. Sementara akuntabilitas, administratif menegaskan perlunya sistem pengendalian dan pelaporan.¹⁷

Kedua, transparansi adalah aspek lain yang krusial dalam membangun kepercayaan publik. Ketika pemimpin atau institusi bersikap terbuka tentang kebijakan dan tindakan mereka, masyarakat akan lebih cenderung untuk mempercayainya. Rasa malu dapat berfungsi sebagai pendorong untuk menciptakan transparansi. Ketika pemimpin merasa malu karena kurangnya transparansi, pemimpin akan terdorong untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan terbuka kepada publik. Rasa malu juga dapat mengingatkan tentang implikasi etis di masa depan apabila politisi berniat tidak transparan kepada publik terkait proses politik.

Menumbuhkan perilaku akuntabel dan transparan adalah tuntutan bagi para pejabat publik atau politisi Indonesia. Kemampuan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam jabatan dapat membantu politisi/pejabat publik menghindari kebiasaan tidak etis lainnya seperti pembenaran diri melalui argumentasi-argumentasi yang cacat secara logika. Fakta para politisi Indonesia adalah cenderung membela diri dan bukan menerima dan melakukan introspeksi diri ketika melakukan kesalahan. Cacat logika dalam argumentasi menjadi senjata untuk melemahkan rasionalitas kritis publik. Cara ini tak lain hanyalah upaya politisi untuk menutupi kebijakan publik yang buruk dan merugikan rakyat. Publik sering kali dihadapkan dengan manipulasi emosi (appeal to emotion) untuk menggantikan argumen logis. Teknik ini digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan emosional publik untuk tujuan tertentu. Hal ini

¹⁶ N. A. Mozumder, "Can Ethical Political Leadership Restore Public Trust in Political Leaders?," *Public Organization Review* 22 (2021): 22, <https://doi.org/10.1007/s11115-021-00536-2>.

¹⁷ Louis Lawrence Ngare, "ETHICS OF POLITICAL LEADERSHIP: EXAMINING ACCOUNTABILITY AND INTEGRITY IN NIGERIA," *IGWEBUIKE: An African Journal of Arts and Humanities* 9, no. 4 (2023): 335.

sering dijumpai dalam kampanye atau debat calon pemimpin, dalam janji-janji seperti peningkatan kesejahteraan, pemberantasan kebodohan, pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya. Misalnya Prabowo berjanji akan memberantas korupsi dan memburu koruptor hingga ke Antartika. Namun, dalam 100 hari kerja kabinetnya, tidak ada tanda-tanda serius pada janji tersebut dan justru memilih sikap lunak terhadap koruptor. Hal ini memperlihatkan hilangnya kemauan politik yang teguh dalam memerangi korupsi sebagai musuh bersama.

Salah membandingkan (*false analogy*) adalah taktik lainnya. Politisi sering kali membandingkan dua hal yang tidak dapat dibandingkan untuk menyamarkan kelemahan argumen. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu utama sehingga lebih fokus pada perbandingan-perbandingan yang sebenarnya tidak relevan. Misalnya, memastikan bahwa hutan dan kelapa sawit merupakan pohon meskipun kedua tanaman tersebut memiliki kompleksitas yang berbeda. Perbandingan ini menjadi cara untuk menghilangkan ketakutan masyarakat terhadap potensi deforestasi. Teknik umum lainnya adalah mengalihkan topik (*red herring*). Sengaja mengalihkan suatu pembahasan ke isu lain untuk menghindari pertanyaan kritis. Taktik ini digunakan untuk mengalihkan perhatian dari inti permasalahan yang sebenarnya. Misalnya, mengalihkan isu pagar laut ke pembahasan tentang kelangkaan gas LPG. Di sini isu utama (pagar laut) menjadi terlupakan.

Argumentasi-argumentasi ini semakin menyesatkan tak kalah etika dalam komunikasi politik diabaikan walaupun vital dalam komunikasi publik. Pejabat publik tidak lagi mengedepankan prinsip etika, transparansi, dan tanggung jawab dalam menyikapi suara ketidakpuasan yang bergema di ruang publik. Mestinya pejabat publik dapat mendengarkan, menanggapi dengan bijak, dan mengambil langkah-langkah perbaikan. Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan sebaliknya. Politisi membungkam suara-suara kritis, dilakukan secara sporadis dan sistemik bahkan aparat keamanan berada di garda terdepan sebagai penindas. Argumentasi tandingan namun kontroversial digemakan untuk melawan kritik publik terhadap skandal politis. Beberapa contoh seperti ucapan "Ndasmu" digemakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan "Kabur aja, kalau perlu jangan balik lagi" dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan melawan tagar "kaburajadulu." Ucapan "Kau yang gelap, bukan Indonesia" oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menanggapi viralnya tagar "IndonesiaGelap." Komunikasi politik tanpa etika ini semakin menunjukkan bahwa pejabat publik sebagai wakil negara tidak mempedulikan tanggung jawab moral untuk menjaga etika dalam bernegara. Di satu sisi, hal ini dengan gamblang memperlihatkan bahwa mentalitas politisi dalam situasi krisis atau kritik bersifat defensif dan bukan responsif dan dialogis. Di lain sisi, argumentasi tandingan namun kontroversial ini semakin memperlihatkan kebobrokan program kerja pemerintah dalam memenuhi janji-janji politik kepada rakyat. Dengan kata lain, transparansi dan akuntabilitas mudah dikompromikan dalam arena politik Indonesia.

Ditelisik lebih dalam, mental defensif para politisi menyiratkan hilangnya rasa malu. Alhasil dengan terang-terangan politisi melakukan kejahatan publik tanpa mempedulikan suara kritis masyarakat. Selama mampu menemukan pembenaran yang bertentangan dengan rasionalitas kritis publik, kejujuran dan kebenaran dapat dikompromikan. Mental defensif semakin menunjukkan bahwa rasa malu sebagai awal integritas moral tidak lagi menjadi tolak ukur dalam praksis politik di Indonesia, dan akhirnya melahirkan hal-hal kontroversial dalam jabatan. Fakta ini bertentangan dengan pemimpin di beberapa negara maju. Komitmen terhadap integritas moral, terutama kesadaran rasa malu selalu menjadi aspek fundamental. Maka tidak mengherankan jika masyarakat Indonesia sulit menemukan sosok pemimpin berintegritas

seperti Roh Moo-Hyun, Seiji Maehara, atau Michael Bates.¹⁸ Pembelajaran penting dari pemimpin ini adalah bahwa dalam pemerintahan diperlukan kejujuran (pengakuan) akan keterbatasan kemampuan sehingga menumbuhkan kesadaran untuk melepaskan jabatan.

Hal yang justru ditemukan dalam arena politik Indonesia adalah sebaliknya, pemimpin problematik dengan karakter otoritatif, manipulatif, dan defensif. Karakter pemimpin Indonesia, lebih tepatnya, adalah pemimpin tanpa pertimbangan yang bijak pada komitmen-komitmen politis, realisasi visi politis tanpa rencana aksi yang konkret dan dapat diukur, tetapi justru berhenti pada janji-janji heroik. Gambaran besar politik Indonesia dalam lima tahun terakhir ini adalah politik yang dipenuhi intrik, ketidakjujuran, dan kebengisan karena lahir dari individu-individu yang justru memiliki otoritas. Etika bernegara, secara langsung dan tak langsung, dirusak oleh kejahatan otoritatif tersebut. Penindasan terhadap perbedaan pendapat menjadi taktik bertahan hidup yang penting bagi kejahatan model ini. Mekanisme kontrol, seperti sensor, pengawasan, dan kekerasan, berfungsi untuk membungkam oposisi dan mempertahankan status. Paling mengerikan adalah mekanisme operasionalnya bergerak secara masif, sporadik, dan sistemik.¹⁹ Hal ini memberi isyarat betapa alerginya kekuasaan terhadap pengawasan.

Namun fenomena-fenomena ini tidak serta merta mengabaikan teladan dari wakil rakyat yang sungguh-sungguh merakyat, yang memaknai jabatan sebagai pelayanan bagi kepentingan bangsa. Wakil rakyat yang berdiri tegak di atas integritas moral dan etika kepemimpinan. Pejabat-pejabat yang masih memiliki rasa malu dan harga diri. Maka dalam konteks kepercayaan publik, rasa malu sebenarnya berfungsi sebagai mekanisme peraturan internal yang dapat mendorong akuntabilitas dengan mendorong rasa tanggung jawab. Secara khusus terkait akuntabilitas politik yang masih menjadi tantangan yang terus-menerus dan lunturnya transparansi dalam pemerintahan yang sulit dibenahi.

Dalam dinamika politik demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara rasa malu dan kepercayaan publik bersifat siklus. Ketika kepercayaan terkikis, efektivitas rasa malu pun berkurang, sehingga menyebabkan kekecewaan lebih lanjut. Rasa malu memang dapat menjadi katalisator yang kuat bagi perilaku etis terkait kepercayaan politis. Namun hal ini mengandaikan bahwa rasa malu dipraksiskan dalam hidup bernegara khususnya oleh politisi/pejabat publik. Dengan kata lain, rasa malu harus menjadi mekanisme introspeksi diri bukan mekanisme pertahanan diri melawan suara kritis publik. Realisasi kesadaran tersebut dapat melahirkan keadilan etis karena politisi tidak akan melihat hubungan antara jabatan dan rakyat sebagai hubungan "tuan dan budak", "tuan yang mempunyai hak penuh untuk menghilangkan budaknya" melalui kebijakan yang "membunuh" hak politik rakyat.²⁰

Menuju Konsepsi Rasa Malu yang Konstruktif

Terlepas dari potensi manfaatnya, menghidupkan kembali kesadaran akan rasa malu dalam politik Indonesia penuh dengan tantangan. Budaya impunitas yang mengakar dan normalisasi penyalahgunaan kekuasaan menimbulkan hambatan yang signifikan. Sifat praktik

¹⁸ Roh Moo-Hyun adalah mantan Presiden Korea Selatan. Pada 2009 ia melakukan bunuh diri di desa tempat tinggalnya di Kota Busan karena dilandasi rasa malu atas keterlibatannya dalam kasus korupsi. Seiji Maehara, Mantan Menlu Jepang berani mengundurkan diri semasa menjabat karena melanggar UU Partai Politik Jepang yang menegaskan bahwa ilegal bagi para politisi menerima sumbangan dari warga negara asing. Seiji menerima uang dari seorang etnis Korea yang bukan warga negara. Pada 2018 eks Menteri Pembangunan Negara Inggris, Michael Bates mengundurkan diri usai merasa malu karena terlambat mengikuti rapat.

¹⁹ Andreas Maurenis Putra, "Demokrasi di Indonesia dan Kejahatan Otoritatif," Kompas.id (Kompas Media Nusantara, 2024), <https://www.kompas.id/artikel/demokrasi-di-indonesia-dan-kejahatan-otoritatif>

²⁰ Steve Larocco, "The Other, Shame, and Politics: Levinas, Justice, and Feeling Responsible," *Religions* 9, no. 12 (2018): 381, <https://doi.org/10.3390/rel9120381>.

korupsi yang meluas telah menyebabkan berkurangnya kepekaan terhadap kemarahan publik, sehingga semakin sulit bagi publik untuk melakukan mobilisasi melawan perilaku tidak etis. Sering kali pelanggaran hukum, dalam hal ini kejahatan publik, yang tidak mendapatkan sanksi yang setimpal (konsekuensi hukum maupun sosial). Hal ini membuat para pemimpin merasa bahwa mereka dapat bertindak tanpa rasa takut, sehingga mengurangi bergemanya kesadaran rasa malu.

Selain itu, bangkitnya media sosial sebagai platform dominan dalam wacana politik menjadi tantangan lainnya. Peran media sosial dalam membentuk wacana publik memperumit dinamika rasa malu. Meskipun media sosial dapat memperkuat tuntutan akuntabilitas, media sosial juga dapat menumbuhkan budaya sensasionalisme dan misinformasi. Para pemimpin politik mengeksploitasi lingkungan ini untuk menghilangkan rasa malu, dengan menganggap kritik sebagai serangan bermotif politik dan bukan sebagai rasa keprihatinan masyarakat. Manipulasi ini melemahkan potensi rasa malu sebagai alat tata kelola yang etis. Rasa malu dapat menjadi alat untuk manipulasi politik, di mana politisi menggunakan rasa malu untuk mengontrol perilaku masyarakat, bukan sebagai panduan untuk tindakan mereka sendiri. Di sini rasa malu dijadikan senjata, bukan digunakan sebagai alat refleksi moral kolektif. Maka untuk secara efektif menghidupkan kembali kesadaran rasa malu dalam kehidupan politik Indonesia, diperlukan pendekatan multifaset.

Pertama, pendidikan politik yang berbasis etika. Salah satu langkah awal untuk mengakarkan kembali rasa malu dalam politik adalah melalui pendidikan politik yang berbasis etika. Pendidikan ini harus dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dengan penekanan pada pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam pembelajaran politik akan membantu siswa memahami pentingnya rasa malu dalam konteks perilaku politik. Misalnya, studi kasus tentang tokoh-tokoh politik yang berintegritas dapat memberikan inspirasi dan teladan bagi generasi muda. John Dewey (1916) menekankan bahwa pendidikan adalah alat untuk membentuk karakter dan moral individu. Dengan begitu, pendidikan politik yang berbasis etika akan menghasilkan pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi.

Kedua, reformasi sistem Pemilihan Umum. Reformasi sistem pemilu merupakan langkah penting untuk memulihkan rasa malu. Sistem yang transparan dan akuntabel akan mendorong politisi bertindak sesuai norma. Menurut Jürgen Habermas (1962) ruang publik yang sehat merupakan kunci terciptanya akuntabilitas. Maka penguatan kelembagaan pemilu dan pengawasan ketat terhadap proses pemilu merupakan langkah krusial yang diperlukan sebagai kerangka pemantauan dan seleksi calon. Tujuannya agar pemilihan pemimpin didasarkan pada meritokrasi dan bukan pada nuansa politik identitas. Terkait hal ini, masyarakat perlu diberikan pendidikan memilih yang memadai agar mereka memahami pentingnya memilih politisi yang berintegritas. "Pendidikan politik yang baik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab politiknya"²¹ dan "menciptakan warga negara yang kritis dan berintegritas."²² Selain itu, membangun lembaga pengawasan yang independen dan kuat untuk memantau kampanye politik dan penggunaan dana kampanye. Harus ada upaya untuk memperketat regulasi terkait pendanaan kampanye untuk mengurangi praktik politik uang. Dana politik dan kampanye juga bisa menjadi alat untuk memperkuat oligarki. Misalnya, jika partai politik sangat tergantung

²¹ P Norris, *Democratic phoenix: Reinventing political activism* (Cambridge University Press, 2002).

²² R.A Dahl, *On democracy* (Yale University Press, 1998).

pada dukungan finansial dari kelompok elit, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih melayani kepentingan finansial elit daripada kebutuhan mayoritas masyarakat.²³

Ketiga, penguatan peran media dan masyarakat sipil. Media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan mengawasi tindakan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan peran media independen dan pemberdayaan masyarakat sipil sangat diperlukan. James Curran menekankan pentingnya media sebagai pengawas kekuasaan. Media harus kembali kepada komitmennya untuk mengawasi tindakan pemerintah dan melaporkan praktik-praktik tidak etis.²⁴ Media sosial harus kembali menjadi platform yang kuat dalam menyebarkan informasi dan menggerakkan opini publik. Media memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung demokrasi yang sehat. Melalui investigasi yang mendalam dan pelaporan yang akurat, media dapat mengungkap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh politisi. Media juga perlu mendidik masyarakat tentang pentingnya integritas dan etika dalam politik. Program-program edukatif yang disiarkan di televisi, radio, atau platform digital dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi dari memilih politisi yang tidak bertanggung jawab.

Terakhir, penerapan sanksi yang tegas terhadap perilaku tidak etis dalam jabatan. Hal ini penting dalam mengembalikan rasa malu. Penegakan hukum yang adil dan transparan harus menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan politik yang sehat. Terutama kini "pentingnya independensi lembaga-lembaga penegak hukum telah menjadi sorotan. Ketidakmandirian kepolisian dan kejaksaan, serta pengaruh politik yang kuat, telah menghambat proses penegakan hukum."²⁵ Independensi dan sanksi yang tegas dapat menimbulkan rasa malu sehingga dapat menuntun politisi pada perubahan hidup. Indonesia dapat belajar dari Tiongkok (China). China melakukan langkah penting. Kemajuan di segala bidang, hingga hari ini mengejutkan dunia, tidak lepas dari usaha keras membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi. China memberikan hukuman berat hingga hukuman mati bagi para koruptor. Padahal di tahun-tahun sebelumnya China dikenal sebagai negara paling korup di dunia. Kondisinya berubah sejak era Deng Xiao Ping. Indonesia perlu belajar bahwa dalam membangun negara yang bersih dari kejahatan politik, kepala pemerintahan sangat menentukan, melalui kebijakan-kebijakan yang tegas, tepat, dan adil.

4. KESIMPULAN

Will Richard Bird dalam novelnya *The Shy Yorkshireman* (1955) mengatakan bahwa perbedaan mencolok antara habitat manusia dan binatang bukan pada logika atau keterampilan, bukan pula keberanian dan rasa takut. Binatang, seperti manusia, bisa menjadi logis, pintar, berani, dan takut. Hal mendasar yang membedakan habitat manusia dan binatang adalah rasa malu. Dalam lingkup kehidupan politik Indonesia, jika para politisi masih menghargai esensi dari eksistensi kemanusiaannya, maka tidak ada jalan lain selain menjadikan rasa malu sebagai tolak ukurnya. Ketika rasa malu hilang atau "ketika manusia sudah tidak memiliki rasa malu lagi maka tidak ada bedanya dengan binatang."²⁶ Demikian halnya dengan politisi. Jika rasa malu hilang, politisi tak ubahnya dengan binatang, hidup diarahkan naluri bukan akal sehat. Ungkapan ini mau

²³ Elva Imeldatur Rohmah, "Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki: Telaah Pemikiran W.A. Bonger," *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 01 (2024): 9, <https://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>.

²⁴ James Curran, *Media and democracy* (Routledge, 2011).

²⁵ Nelson, "LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 629, <https://doi.org/10.33654/multilingual.v3i1.142>.

²⁶ Wawan Wahyuddin, "BUDAYA MALU DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI: IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA," *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)* 3, no. 1 (2017): 92-103.

menunjukkan bahwa jika para politisi masih sadar akan keberadaannya, tanggung jawab jabatannya, apalagi merasa menjadi bagian dari budaya Indonesia, maka menumbuhkan rasa malu dalam hidupnya adalah hal yang tidak bisa dikompromikan lagi. Politisi harus segera sadar bahwa rasa malu bukan hanya sebuah emosi, tetapi juga merupakan landasan etis yang akan membimbing perilaku dan tindakannya menuju integritas dalam kepemimpinan demi meraih kepercayaan publik. Hilangnya rasa malu berkontribusi besar terhadap rusaknya tatanan sosial bahkan negara.²⁷ Hal ini terbukti dalam beberapa tahun terakhir, ketika para politisi gencar melakukan kejahatan moral.

Rakyat harus membangkitkan kesadaran kolektif untuk tidak hanya sibuk memangkas cabang-cabang kejahatan politik yang merusak tatanan republik ini. Tidak cukup hanya mencegah praktik jual beli suara, lemahnya institusi politik, keterhubungan uang dan politik, hubungan patron-klien, korupsi, kolusi dan nepotisme. Rakyat harus berperan dalam menyelamatkan republik dengan kesadaran bersama akan akar utama permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Dan akar utamanya disini adalah bangsa ini telah kehilangan rasa malu sebagai kesadaran moral dalam para pejabat publik/politisinya. Hilangnya rasa malu bukan lagi sebuah krisis yang bersifat sementara namun sudah menjadi permasalahan politik yang eksistensial dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Tantangan untuk memulihkan dan mempertahankan rasa malu dalam praktik politik kontemporer di Indonesia sangatlah besar. Namun, rakyat harus menyadarkan para politisinya bahwa perilaku dan tindakan yang jahat secara moral mempunyai dampak yang luas. Jalan keluarnya adalah dengan mengakarkan kembali rasa malu sebagai bagian dari etika politik atau etika kepemimpinan. Dengan cara ini, akan tercipta lingkungan politik yang lebih sehat, lebih transparan dan akuntabel, lebih bermoral dan rasional. Imbalannya adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap politisi/pejabat publik/pemimpin di negeri ini.

REFERENSI

Adair, John. *Inspiring Leadership*. Talbot Adair Press, 2002

Adloff, Frank. "Thomas J. Scheff: Shame and the Social Bond." *Hauptwerke der Emotionssoziologie*, 2013, 290–95. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93439-6_42.

Aristotle. *Nicomachean ethics*. Diterjemahkan oleh W.D. Ross. 182 pages vol. Batoche Books, 1999.

Azizie, Utsman Mauridho, Muhamad Daffa, dan Dayinta Sukma Kumala. "Etika dan moral kepemimpinan lembaga negara: Studi rasa bersalah dan malu terhadap kasus korupsi ketua KPK firli bahuri." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 929. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13751184>.

Bates, Rodger, dan Bryan LaBrecque. "The Sociology of Shaming." *The Journal of Public and Professional Sociology* 12, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.62915/2154-8935.1162>.

²⁷ Sizuka, "Memupuk rasa malu untuk mewujudkan Indonesia Maju," Antara News (ANTARA, 2023), <https://www.antaranews.com/berita/3668001/memupuk-rasa-malu-untuk-mewujudkan-indonesia-maju>.

- Bintang, A Shaifddin. "Demokrasi Sakit." *kompas.id*. Harian Kompas, 2024. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/07/22/demokrasi-sakit>.
- Creswell, J.W, dan J.D Creswell. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4 ed. SAGE Publications, 2017.
- Curran, James. *Media and democracy*. Routledge, 2011.
- Dahl, R.A. *On democracy*. Yale University Press, 1998.
- Edward Aspinall. "The Irony of Success." *Journal of Democracy* 21, no. 2 (2010): 20–34. <https://doi.org/10.1353/jod.0.0157>.
- Geertz, Clifford. *The interpretation of cultures*. Basic Books, 1973.
- Giawa, E. Constant, dan Nani Nurrachman. "REPRESENTASI SOSIAL TENTANG MAKNA MALU PADA GENERASI MUDA DI JAKARTA." *Jurnal Psikologi* 17, no. 1 (2018): 79. <https://doi.org/10.14710/jp.17.1.77-86>.
- Hudi, Ilham, Hadi Purwanto, Annisa Miftahurrahmi, Fani Marsyanda, Giska Rahma, Adinda Nur Aini, dan Aci Rahmawati. "Krisis Moral dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 1, no. 2 (2024): 233–41.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Djambatan, 1985.
- Larocco, Steve. "The Other, Shame, and Politics: Levinas, Justice, and Feeling Responsible." *Religions* 9, no. 12 (2018): 381. <https://doi.org/10.3390/rel9120381>.
- Liu, Yu. "The Positive Motivation of Shame: Moral Emotion in the Mencius." *Religions* 14, no. 4 (2023): 495–495. <https://doi.org/10.3390/rel14040495>.
- Marbun, Robinson, dan Rencan Marbun. "MENUNTUN KEPADA PENGERTIAN RASA MALUDALAM MEMBANGUN KEBERANIAN HIDUP BENAR." *Jurnal Eksplorasi Teologi* 7, no. 5 (2023): 41–47.
- Mencius, Irene Bloom, dan P J Ivanhoe. *Mencius*. Columbia University Press, 2011.
- Mestika Zed. *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Mozumder, N. A. "Can Ethical Political Leadership Restore Public Trust in Political Leaders?" *Public Organization Review* 22 (2021). <https://doi.org/10.1007/s11115-021-00536-2>.
- Nelson. "LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 629. <https://doi.org/10.33654/multilingual.v3i1.142>.
- Ngare, Louis Lawrence. "ETHICS OF POLITICAL LEADERSHIP: EXAMINING ACCOUNTABILITY AND INTEGRITY IN NIGERIA." *IGWEBUIKE: An African Journal of Arts and Humanities* 9, no. 4 (2023): 335.
- Norris, P. *Democratic phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge University Press, 2002.
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. "Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 464–80. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.464>.
- putra, andreas maurenis. "Demokrasi di Indonesia dan kejahatan Otoritatif." *Kompas.id*. PT Kompas Media Nusantara, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/demokrasi-di-indonesia-dan-kejahatan-otoritatif>.

- Regif, Surya, dan Muhammad Akbar Pribadi. "Destruction Democracy Through Determinants of Vote Buying in General Elections in Indonesia." *Bestuurskunde Journal of Governmental Studies* 4, no. 1 (2024): 15–30. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.4.1.15-30>.
- Richburg, Keith B. "Opinion | Southeast Asian dynasties are rising again. That's troubling news." *Washington Post*, 2023. <https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/28/southeast-asia-political-dynasties-rise/>.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Perubahan Paradigma Politik di Indonesia Dari Demokrasi ke Oligarki: Telaah Pemikiran W.A. Bongor." *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik* 16, no. 01 (2024): 9. <https://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>.
- Siagian, Fahrizal S., Andi Hakim Lubis, Nabila Afifah Salwa, dan Saied Firouzfar. "Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 1 (2024): 29–52. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>.
- Siga, Willfridus Demetrius, dan Onesius Otenieli Daeli. "Darurat Demokrasi: Krisis Keadilan Dan Bias Kepentingan." *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora* 4, no. 02 (2024): 180–89. <https://doi.org/10.26593/jsh.v4i02.8629>.
- Sizuka. "Memupuk rasa malu untuk mewujudkan Indonesia Maju." Antara News. ANTARA, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3668001/memupuk-rasa-malu-untuk-mewujudkan-indonesia-maju>.
- Sukidi. "Demokrasi di Ujung Kematian." *kompas.id*. Harian Kompas, 2024. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/04/demokrasi-di-ujung-kematian>.
- Tempo dan Arif Zulkifli. "Korupsi Jokowi 2024 OCCRP." Tempo, 2025. <https://www.tempo.co/kolom/korupsi-jokowi-2024-occrp-1192917>.
- Verkuyl, J. *Etika Kristen: bagian umum*. 31 ed. PT BPK Gunung Mulia, 2018.
- Wahyuddin, Wawan. "BUDAYA MALU DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI: IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA." *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)* 3, no. 1 (2017): 92–103.
- Westerlund, Fredrik. "Shame, Love, and Morality." *The Journal of Ethics* 26, no. 4 (2022): 517–42. <https://doi.org/10.1007/s10892-022-09402-9>.
- Widiyanti, Syifa Najla, dan Kamaruddin Salim. "Budaya Malu Sebagai Fakta Sosial Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 44, no. 2 (2023): 94. <https://doi.org/10.47313/jidb.v44i2.2352>.